

MODEL PROGRAM SABILULUNGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA

Salamatul Afiyah^{1)*}, Ratna Meilinda¹⁾, Riyanti Siti Fauziah¹⁾ & Rizal Abdussalam¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾

*Email: salamatul.afiyah@uinsgd.ac.id**

Abstract

The Sabilulungan Raksa Desa program is a community empowerment program created by the Bandung Regency Government. This program was created in order to improve the quality of infrastructure that involves the development of the role of the government and the people in the implementation of development carried out in villages by utilizing local resources. The Sabilulungan Raksa Desa program has been implemented by the Bandung Regency government throughout the Bandung Regency area. One of the target villages of the Sabilulungan Raksa Desa program is Cileunyi Kulon Village. The purpose of writing this paper is to determine the role of the government in empowering and developing local communities through the Sabilulungan Raksa Village program. Through the implementation of the program, the efforts made by the government in infrastructure development are carried out in the village of Cileunyi Kulon, Bandung Regency. The research method used is an approach to data collection techniques for library research. With the conclusion that the role of the local government is successful in implementing the Sabilulungan Raksa Desa Program.

Keywords: *Village Government, Development, Community Empowerment*

Abstrak

Program Sabilulungan Raksa Desa merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Program ini dibuat guna dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastuktur yang melibatkan keaktifan dari peran pemerintah serta rakyat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Program Sabilulungan Raksa Desa telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung diseluruh wilayah Kabupaten Bandung. Salah satu desa sasaran dari program Sabilulungan Raksa Desa ini adalah Desa Cileunyi Kulon. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan dan pembangunan kepada masyarakat setempat dengan melalui program Sabilulungan Raksa Desa. Melalui pelaksanaan program, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan infrastuktur yang dilakukan di desa Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Dengan kesimpulan peran pemerintah daerah berhasil dalam penerapan program Sabilulungan Raksa Desa.

Kata kunci: Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Riggs menyatakan bahwa ekologi menggambarkan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Engkus, 2017). Ekologi adminisitrasi merupakan suatu proses yang dimana bertujuan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat melalui pembangunan, perbaikan baik pada bidang sumber daya manusia ataupun organisasi sehingga terjadi pula proses timbal balik. Ekologi adminisitrasi sendiri merupakan ilmu dimana mempelajari adanya proses saling memengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative secara total dab timbal balik antara lembaga tinggi Negara maupun pemerintah, vertical-horizontal dan masyarakatnya

(Gumilar, 2021). Sistem administrasi sendiri tidak lepas keterkaitannya dengan masyarakat, sehingga dapat dikatakan aktor-aktor yang terlibat dalam ekologi administrasi publik adalah pemerintah dan masyarakat.

Keberhasilan dari suatu pembangunan nyatanya tidak terlepas dari peran pemerintah maupun masyarakat yang saling melakukan kerjasama demi kemajuan daerahnya. Tujuan dari pembangunan nasional di Indonesia yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, kemandirian serta keadilan bagi seluruh rakyatnya. Peran pemerintah desa sebagai lini terdepan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara optimal demi tercapainya tujuan nasional tersebut. Tetapi, dalam kenyataannya banyak sekali terdapat kesalahan-kesalahan yang kurang menguntungkan seperti lemahnya capital sosial dan tidak tepat sasaran.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat. Sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Bandung ini merupakan wilayah pedesaan. Menurut Bupati Bandung yang menjabat saat itu juga mengakui bahwa masih terdapat masalah-masalah kompleks yang ada diwilayahnya seperti :

1. Banyak masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki rumah yang layak huni.
2. Ketersediaan air bersih yang kurang.
3. Kurangnya sistem sanitasi atau saluran pembuangan MCK yang baik.
4. Kurangnya tempat pembuangan sampah terpadu.
5. Perubahan kondisi alam yang kian hari kian memburuk .

Disinilah peran pemerintah dan masyarakat dibutuhkan. Upaya-upaya yang dilakukan harus secara optimal dengan mengatasinya melalui peningkatan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki visi dan misi dimana pencapaiannya dilakukan salah satunya dengan menjadikan pembangunan desa sebagai ujung tombaknya (Abdurohim, 2018).

Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Kabupaten Bandung, menyatakan bahwa “Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa merupakan suatu kegiatan untuk perbaikan dan pembangunan sarana fisik di wilayah Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Salah satu tujuan program ini dibentuk adalah untuk mempercepat capaian peningkatan dari kualitas pembangunan fisik melalui peran serta dari pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Pelaksanaan terkait Reksa Desa ini juga guna mendorong pembangunan dan penanggulangan kawasan-kawasan kumuh di desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung berupa ketersediaan fasilitas cuci, kakus, fasilitas mandi dan rumah layak huni.

Desa Cileunyi Kulon adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Masyarakat yang ada di desa Cileunyi Kulon belum sepenuhnya memiliki rumah layak huni dan fasilitas sanitasi yang baik. Tidak hanya itu, pada saat musim kemarau masyarakat sering sekali mengalami kekurangan air bersih yang diakibatkan karena minimnya ketersediaan air bersih.

Dengan adanya hal-hal tersebut keterlibatan antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Peran antara pemerintah dan masyarakat menjadi hal penting dalam pembangunan di desa Cileunyi Kulon guna menjadikan desa Cileunyi Kulon menjadi lebih baik dan terarah. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah melalui program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bandung.

B. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan

Sebenarnya tidak ada aspek yang spesial dalam konsepsi pembangunan. Beberapa pembangunan yang selalu dirumuskan dalam suatu kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan, seperti yang terjadi di beberapa negara seperti Singapura, Australia dan lain sebagainya. Kebijakan ekonomi di negara tersebut umumnya menggunakan aspek sosial lingkungan yang didukung oleh mekanisme politik sehingga tercipta kebijakan ekonomi yang transparan. Dalam aspek sosial, pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan juga lembaga sosial yang fungsinya ditingkatkan. Kemudian dalam aspek lingkungan pemerintah mengedepankan pemberdayaan atau pemeliharaan terhadap lingkungan manusia untuk kedepannya.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dibagi menjadi dua paradigma pertama, modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Kedua paradigma ketergantungan, mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994).

Sebenarnya tidak ada yang pasti dalam pengertian pembangunan karena setiap disiplin ilmu memiliki pengertiannya masing-masing. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Digdowiswio, 2019). Pada dasarnya pembangunan menekankan pada perubahan, kemajuan, pertumbuhan, dan modernisasi (Digdowiswio, 2019).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory (Noor, 2011). Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social, Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan.

Peran Penting Masyarakat Dalam Pembangunan

Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UUD 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Dalam GBHN pembangunan nasional juga telah menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup

secara bertahap pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki negara dilakukan secara bijaksana sebagai landasan pembangunan tahap berikutnya. Oleh sebab itu peningkatan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terutama yang menyangkut secara langsung kehidupan dan masa depan mereka. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 5 ayat 1). Serta mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal berikutnya menegaskan bahwa setiap orang juga berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal 6).

Peranan informasi dalam pengelolaan lingkungan sangat penting oleh karena itu setiap orang juga berhak atas dan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang lingkungan hidup yang benar dan akurat. Ada tiga hal utama yang harus dilihat sebagai pesan konstitusional dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia, (1) bahwa pengelolaan sumberdaya alam Indonesia haruslah dilihat sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan, mayoritas rakyat Indonesia; (2) bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam pengaturan pengelolaan sumberdaya alam sebagai manifestasi penguasaan negara terhadap sumberdaya alam; (3) bahwa rakyat dijamin haknya tidak saja untuk berperan serta dalam pengelolaan sumberdaya alam tetapi juga dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah sebagai lembaga yang telah dimudahkan untuk melakukan pengaturan. Pengalaman selama Indonesia berada dibawah cengkaman orde baru telah membuktikan, bahwa pengingkaran terhadap ketiga hal utama dalam konstitusional ini telah memunculkan persoalan besar terhadap lingkungan hidup Indonesia. Perusakan lingkungan hidup dan pengurusan sumberdaya alam nyaris tidak terkontrol dan disisi lainnya peran serta masyarakat mengalami distorsi yang terus menerus melalui rekayasa berbagai peraturan dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Proses perusakan lingkungan hidup dan pengurusan sumberdaya alam berjalan seiring dengan dikesampingkannya peran serta rakyat.

Kontrol sosial yang datang dari luar lingkaran elit (politik dan ekonomi) selama lebih dari 30 tahun kekuasaan orde baru cenderung untuk didiskriminalisasikan tentu saja merupakan pengingkaran terhadap realitas sosial Indonesia. Pemerintah harus merespon serta mengakomodir aspirasi dari reformasi dengan cara memberanikan diri untuk mengundang public debate serta substansi peraturan perundangan harus berorientasi pada keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Peran Penting Pemerintah Desa dalam Pembangunan

Levinson (Gumilar, 2021) menguraikan peran ke dalam tiga cakupan. Salah satunya dengan mengklasifikasikan peran sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam perspektif ini, desa dapat dilihat sebagai organisasi dimana semua elemen memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Artinya, dari elemen terkecil desa yakni masyarakat hingga elemen struktural yakni pemerintah desa memiliki perannya masing-masing dalam membangun desa sebagai organisasi. Seperti halnya tahapan yang ada dalam kebijakan publik, dalam pembangunan sendiri juga terdapat 3 (tiga) tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Maka dalam penganalisisan data ini, peran pemerintah-masyarakat akan dijelaskan ke dalam tiga bagian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena dapat memberi gambaran yang terperinci, mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah atau fenomena yang bersifat

terbatas. (Creswell, 2016) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi non partisipatoris dan dokumentasi. Ada pun informan dipilih menggunakan metode non probabilitas sampling dengan penarikan sampel purposive sampling dengan informan yang memiliki kaitan dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah melalui program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bandung. Kemudian data dianalisis melalui proses mempersiapkan data terlebih dahulu, memulai coding semua data, menarasikan data dan sampai pada pembuatan interpretasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 berisi tentang bagaimana proses dilaksanakannya Program Sabilulungan yang diawali dengan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Terdapat beberapa tingkatan dalam perencanaan itu sendiri yaitu tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Menurut Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 terdapat tahapan dalam perencanaan di tingkat desa, yaitu:

- a. Untuk menyampaikan seberapa besar biaya yang digunakan dalam kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa maka dilaksanakan musyawarah desa penetapan pelaksanaan kegiatan oleh RT, RW, pengurus LPMD, dan anggota BPD
- b. Terdapat beberapa agenda dari musyawarah desa tersebut:
- c. Menyampaikan pembiayaan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang didapatkan oleh desa;
- d. Menyusun dan memutuskan TPKD;
- e. Membentuk panitia yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebanyak 5 (lima) orang yang berada dibawah tanggungan TPKD untuk kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa;
- f. Harus berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa apabila akan mengajukan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Selanjutnya menurut Camat Cileunyi Bapak Yayan Suheryan, untuk memulai proses perencanaan di tingkat kecamatan maka Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian melakukan pengecekan administrasi agar sesuai dengan tempat tujuan kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa. Proses selanjutnya di tingkat Kabupaten. Menurut Ibu Rohmiasih, M.Si, Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung. Tim Pembina Kabupaten merundingkan pelaksanaan sosialisasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa apabila semua hasil perencanaan dari setiap kecamatan telah didapatkan.

Proses pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dijelaskan oleh Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

- a. Melakukan tahap sosialisasi dengan pihak Desa dan Kecamatan
- b. Mengumpulkan aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan menargetkan sasaran yang ingin diperoleh
- c. Apabila telah ditetapkan, selanjutnya mencairkan dana yang akan disalurkan melalui keputusan Bupati
- d. Ketika dana sudah cair, seluruh proses pelaksanaan program dipantau dan dimintai laporan kegiatannya secara berkala.

Tabel 1. Kegiatan Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Desa Cileunyi Kulon Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Realisasi	Nilai Bantuan (Rp)
1	SPAL Kp Galumpit RW 17	100%	10.000.000,
2	Perbaikan Sehat Nugraha RT 01/06	100%	10.000.000,
3	Perbaikan Rumah Sehat Ibu Iroh RT 02/04	100%	10.000.000,
4	Perbaikan Rumah Sehat Bapak Tatang RT 03/23	100%	10.000.000
5	Perbaikan Rumah Sehat Bapak Deni Sundana RT 02/15	100%	10.000.000
JUMLAH			50.000.000

Sumber: APBDes Cileunyi Kulon Tahun 2017

Pembiayaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dijelaskan mengenai Pembiayaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa. Bersumber dari hasil pengumpulan data menurut Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung diketahui bahwa pengalokasian dana PSPM Raksa Desa ditanggung oleh APBD Kabupaten Bandung. Sebagaimana SK Bupati dana yang didapatkan oleh setiap desa sekitar Rp.50.000.000, sebab dana PSPM Raksa Desa dengan dana Reses dipisahkan sejak tahun 2016 lalu.

Sedangkan menurut Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Ibu Rohmiasih, M.Si, Proses pemberian dana dilakukan secara langsung dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yaitu dengan cara mentransfer melalui rekening yang bersangkutan. Dan APBN Kabupaten Bandung lah yang membiayai pelaksanaan program ini. Berdasarkan hasil data, karena dana yang didapatkan dari pemerintah desa diberikan secara langsung maka proses pembiayaan dianggap berhasil dan berlangsung dengan jelas dan sederhana.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Raksa Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Cileunyi Kulon

Di dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung.

- Faktor Penghambat
 - a. Masih rendahnya pendidikan sebagian aparat desa dalam melaksanakan PSPM Raksa Desa .
 - b. Dalam penerapan PSPM Raksa Desa masih terjadi ketertinggalan sosialisasi dasar hukum
 - c. Adanya masalah saat akan menentukan pihak penerima bantuan. Hal itu disebabkan bantuan yang disiapkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan banyaknya permintaan bantuan dari masyarakat.
 - d. Total bantuan yang diberikan tidak seimbang dengan program yang dijalankan.
 - e. Terdapat dua tahap dalam mencairkan dana

- Faktor Pendukung
 - a. Hingga sekarang pembiayaan program ini masih berlanjut dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Bandung. Hal itu karena Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa sangat didukung oleh pemerintah Kabupaten Bandung.
 - b. Tingginya keikutsertaan masyarakat dalam bentuk tenaga, pikiran, uang serta bahan material juga turut mendukung pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.
 - c. Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa terkoordinasi dengan baik antara tiap pihak terkait sehingga tidak terjadi salah komunikasi.

Dari faktor-faktor diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tingkat ekonomi dan taraf hidup masyarakat, serta tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui realisasi program-program pembangunan yang sudah diterapkan oleh pemerintah maka pemerintah desa dan masyarakat harus bekerjasama agar berhasil dalam mewujudkan pembangunan. Upaya pemerintah desa dalam menanggulangi faktor penghambat, diantaranya:

1. Meningkatkan kinerja aparat desa.
2. Melakukan pembinaan kepada para aparat desa mengenai PSPM Raksa Desa.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.
4. Memfasilitasi penerima bantuan yang dinilai masih kurang.

E. SIMPULAN

keberhasilan yang terjadi bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam memfasilitasi masyarakatnya untuk melaksanakan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di desa Cileunyi Kulon berhasil dan dilakukan dengan baik. Selain itu tidak lepas dari peran masyarakat desa Cileunyi Kulon yang ikut serta dalam program Sabilulungan pemberdayaan masyarakat Raksa Desa dalam bentuk tenaga, pikiran, uang serta bahan material. Maka dari itu, faktor utama keberhasilan Program Sabilulungan pemberdayaan masyarakat Raksa Desa di desa Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung adalah adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa tersebut yang terjalin dengan sangat baik, sehingga menjadikan daerah tersebut mengalami kondisi yang lebih baik sebelumnya, dan masalah-masalah yang terjadi teratasi dengan baik.

REFERENSI

- Abdurohim. (2018). Impelementasi Program “Sabilulungan” Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 3(1), 13–30.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Mushawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kebijakan San Manajemen Publik*, 3(2), 63–64.
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)* (1st ed., pp. 84–85). PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Ejournal.Uin-Suska Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41–52.
- Digdowiswio, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 91–101.

ARTIKEL

- Gumilar, D. (2021). Kolaborasi Peran Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 27–35.
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24–29.
- Imtihan, H., Wahyunadi, F. (2017). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Musrenbag Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Neo-Bis*, 11(1).
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Governance*, 5(1), 1–18.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 94–95.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Ulumiyah, I., Andi Gani, A.J., Indah Mindarti, L. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi PUblik*, 1(5), 890–899.